

**SISTEM *BARCODE* SEBAGAI SOLUSI OPTIMALISASI LAYANAN
INFORMASI PERSYARATAN PENGURUSAN TANAH DI DESA
SINDANGPRABU KABUPATEN GARUT**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

ANANDA FADILLAH FAKHMI

NIT. 22314448

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

The Sentuh Tanahku Application was introduced by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) as a means of accessing land information and services electronically. However, its implementation still faces several obstacles, including low levels of digital literacy among the community, an application interface considered insufficiently simple, limited internet access, and discrepancies between the information requirements listed in the application and the policies applied by the Garut Regency Land Office, all of which make it difficult for rural communities to obtain accurate land information quickly. This study aims to analyze the factors causing these difficulties, identify the causes of the information discrepancies, and design a barcode system as a complementary solution in Sindangprabu Village. The study employs a descriptive qualitative method with an empirical approach, using interviews, observation, and documentation. The results show that digital literacy, internet access, and the complexity of the application interface are the main contributing factors to the obstacles faced, while the information discrepancies stem from local policy discretion. The designed barcode system has proven effective in improving the convenience, efficiency, and accuracy of land information as a complement to the Sentuh Tanahku Application.

Keywords: *Sentuh Tanahku Application, barcode system, land information, public service digitalization, Sindangprabu Village.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	xi
INTISARI.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Penelitian Terdahulu.....	9
2.2. Kebaruan Penelitian (<i>Novelty</i>)	12
2.3. Landasan Teori	13
2.3.1. Pelayanan Publik.....	13
2.3.2. Layanan Informasi Pertanahan Secara Digital	14
2.3.3. Aplikasi Sentuh Tanahku	15
2.3.4. Sistem <i>Barcode</i>	16
2.3.5. Literasi Digital	18
2.3.6. Kualitas Informasi.....	19
2.4. Kerangka Pemikiran.....	20
2.5. Kerangka Teori.....	22
2.6. Pertanyaan Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1. Metode Penelitian.....	26

3.2.	Lokasi Penelitian.....	27
3.3.	Jenis Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	27
3.4.1.	Jenis dan sumber data.....	27
3.4.2.	Teknik Pengumpulan Data	30
3.4.2.3.	Observasi (Pengamatan Langsung).....	32
3.4.	Analisis Data	38
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		40
4.1	Gambaran Umum Desa Sindangprabu.....	40
4.1.1	Kondisi Geografis	40
4.1.2	Wilayah Administrasi	41
4.1.3	Kondisi Kependudukan.....	43
4.2	Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Garut.....	45
4.2.1	Profil Kantor.....	45
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		47
5.1	Kesulitan Masyarakat dalam Mengakses Layanan Informasi Pertanahan Secara Digital.	47
5.1.1	Literasi Digital Masyarakat.....	47
5.1.2	Keterbatasan Akses Internet.....	54
5.2	Penyebab Terjadinya Ketidakkonsistenan Informasi antara Aplikasi Sentuh Tanahku dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Garut	57
5.2.1	Informasi pada Aplikasi Bersifat Baku	57
5.2.2	Adanya Budaya Kebijakan Administratif di Kantor Pertanahan	58
5.3	Dampak Ketidaksesuaian Informasi terhadap Pelayanan	64
5.4	Konsep dan Perancangan Sistem <i>Barcode</i> sebagai Solusi Optimalisasi Informasi Pertanahan.....	66
5.4.2	Struktur dan Penyusunan Informasi dalam Sistem <i>Barcode</i>	71
5.4.3	Keunggulan Sistem <i>Barcode</i>	90
5.5	Tanggapan Masyarakat, Perangkat Desa, dan Kantor Pertanahan terhadap Sistem <i>Barcode</i>	95
BAB VI		102
PENUTUP.....		102
6.1	Kesimpulan	102
6.2	Saran.....	103

6.2.1	Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Garut.....	103
6.2.2	Bagi Pemerintah Desa Sindangprabu.....	103
6.2.3	Bagi Masyarakat Desa Sindangprabu	103
6.2.4	Bagi Peneliti Selanjutnya	103
DAFTAR PUSTAKA		104
LAMPIRAN.....		107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era digital saat ini, pemanfaatan teknologi terus dikembangkan dan semakin canggih. Secara umum, era digital adalah masa evolusi di mana segala aspek kehidupan menjadi serba digital. Hadirnya Revolusi Industri 5.0 secara fundamental mengubah cara berpikir, bersosialisasi, berkomunikasi, dan cara pandang manusia terhadap kehidupan, termasuk semua aspek seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pada era Revolusi Industri 4.0 lebih fokus terhadap otomatisasi dan efisiensi, sedangkan era Revolusi Industri 5.0 menempatkan manusia sebagai mitra utama teknologi, di mana mesin membantu pekerjaan manusia secara berulang, baik dari segi pekerjaan yang sederhana maupun berbahaya, sehingga manusia bisa lebih fokus dalam pengambilan keputusan, mengolah kreativitas dan inovasi. Dengan begitu, teknologi sangat membantu dalam meningkatkan produktivitas manusia (Siagian, 2023). Revolusi ini memunculkan berbagai fenomena dan dampak yang mendorong masyarakat untuk mendesak pemerintah melakukan perubahan terhadap sistem yang ada saat ini. Kondisi tersebut menciptakan urgensi transformasi dari sistem kebijakan lama yang serba manual menjadi sistem kebijakan serba digital, menjadikannya lebih transparan dan akuntabel. Dengan begitu, perubahan dari sistem manual menjadi *digital* di era Revolusi Industri 5.0 merupakan suatu yang tidak bisa ditunda atau dihindari lagi. Konsep sistem *digital* berorientasi pada prinsip efektivitas (melaksanakan sesuatu yang tepat) dan efisiensi (melaksanakan sesuatu dengan tepat, cepat dan sempurna) (Hidayat, 2023). Oleh karena itu beberapa instansi pemerintah telah melakukan revolusi pelayanan publik dari sistem manual menjadi sistem digital.

Pelayanan publik merupakan kewajiban bagi instansi pemerintah yang memiliki mandat sebagai pelayan masyarakat. Dalam menjalankan

fungsinya, pemerintah harus menjamin kepuasan masyarakat dalam berbagai kebutuhan. Dalam konteks ini, Kementerian ATR/BPN memiliki kewajiban dan wewenang untuk mengelola serta menetapkan kebijakan pertanahan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan harus memastikan telah memberikan pelayanan yang optimal. Oleh sebab itu, dampak dari Revolusi Industri 5.0 kini menyentuh semua elemen masyarakat, termasuk juga bagi penyandang disabilitas. (Syaifurrohman & Nasution, 2021).

Pelayanan pertanahan termasuk dalam salah satu pelayanan publik yang bermasalah di Indonesia, berdasarkan laporan Ombudsman Republik Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa urusan pertanahan selalu berada di tiga besar sektor yang paling banyak diadukan. Berdasarkan laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2023, menerima laporan dengan substansi agraria/pertanahan sejumlah 1.190 laporan dari total 8.458 laporan yang diterima pada tahun 2023. Selanjutnya pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II, Ombudsman RI mencatat laporan dengan substansi agraria/pertanahan mencapai 979 laporan. Dari banyaknya laporan yang dikeluhkan masyarakat adalah kurang transparansi dalam penerbitan sertifikat tanah, kurang partisipatif dan terjadi penyalahgunaan wewenang baik dari perangkat desa maupun pejabat terkait (Ombudsman RI, 2025).

Menanggapi tuntutan era digital dan keluhan dari masyarakat, Kementerian ATR/BPN mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya adalah alih media sertifikat yaitu proses konversi data dari format dokumen fisik menjadi format dokumen elektronik. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap pesatnya perkembangan teknologi digital, perubahan ini bertujuan memberikan rasa aman dan kemudahan akses bagi masyarakat. Rasa aman tersebut didapat karena sertifikat yang dimiliki tidak lagi berbentuk fisik yang rentan rusak atau hilang akibat musibah, sertifikat kini berbentuk elektronik dan dapat diakses melalui *smartphone* atau perangkat sejenis. Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga

menghadirkan aplikasi Sentuh Tanahku sebagai sarana untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi pertanahan secara langsung, kapan pun dibutuhkan. Kemajuan teknologi turut mendorong percepatan layanan berbasis elektronik. Pada akhirnya, langkah ini dilakukan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kemudahan yang optimal, meningkatkan transparansi layanan, serta mendekatkan informasi pertanahan kepada masyarakat secara lebih praktis, aman, cepat dan efisien. (Masri & Hirwansyah, 2023).

Aplikasi Sentuh Tanahku adalah platform yang diluncurkan kementerian ATR/BPN dan telah diperkenalkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, Sentuh Tanahku sudah tersedia di Google Playstore dan App Store, Sentuh Tanahku menyajikan fitur untuk partisipasi plot bidang tanah jika sertifikat tanah belum berdata sebagai persil bidang pada peta, informasi syarat-syarat pengurusan sertifikat dan juga terkait informasi pertanahan lainnya, pelayanan disajikan beserta simulasi biaya yang interaktif sehingga dapat memprediksi biaya yang diperlukan untuk pengurusan layanan tersebut. Selain itu mempermudah masyarakat dalam pengaduan dan permasalahan terkait pertanahan, dengan ini menciptakan transparansi dan akuntabel dalam layanan pertanahan. (Wulan & Mustam, 2017)

Meskipun telah terdapat berbagai fitur canggih yang tersedia di Aplikasi Sentuh Tanahku dan sebenarnya sangat membantu kebutuhan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya masih ada ketidaksesuaian antara informasi di aplikasi dan di kantor pertanahan setempat, salah satu contoh perbedaan informasi yang tersedia yaitu informasi terkait persyaratan pengurusan sertifikat. Perbedaan ini terjadi karena informasi persyaratan yang ada di aplikasi adalah kebijakan dasar dari Kementerian, sehingga informasi lain seperti formulir yang sesuai dengan kop surat masing-masing kantor belum tersedia, bentuk kebijakan kantor pertanahan setempat seperti apa, persyaratan yang di berlakukan apa aja, dan hal-hal

rinci lainnya belum dicantumkan, akibatnya, keselarasan informasi antara aplikasi dan ketentuan yang diberlakukan di masing-masing kantor pertanahan menjadi berbeda, sehingga implementasi dari aplikasi sentuh tanahku belum maksimal yang dimana adanya aplikasi sentuh tanahku untuk mempermudah layanan informasi bagi masyarakat tanpa mendatangi kantor pertanahan. Kondisi tersebut berdampak pada terhambatnya proses pelayanan, khususnya dalam pengajuan permohonan oleh masyarakat. Kurangnya informasi persyaratan yang lengkap menyebabkan pemohon tidak membawa dokumen yang seharusnya dibutuhkan, sehingga permohonan tidak dapat langsung diproses. Hal ini tidak hanya memperlambat alur penyelesaian layanan, tetapi juga menyebabkan penumpukan berkas permohonan di kantor pertanahan. Selain itu, penyebab jarak antara tempat tinggal masyarakat dengan kantor pertanahan juga menjadi kendala tersendiri, karena masyarakat harus bolak-balik untuk melengkapi persyaratan yang kurang. Akhirnya, muncul anggapan dari masyarakat bahwa proses pengurusan berjalan lambat, padahal keterlambatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh ketidaksesuaian dan ketidaklengkapan informasi persyaratan yang diterima sejak awal. Oleh karena itu, kondisi ini perlu segera di atasi agar dapat mengurangi keterlambatan proses pelayanan, serta mendorong terjalinnya koordinasi yang lebih baik antara masyarakat dan pegawai BPN dalam proses pelayanan pertanahan.

Selain itu, dalam praktiknya tampilan aplikasi Sentuh Tanahku masih terasa kurang sederhana dan belum sepenuhnya dapat dipahami oleh pengguna, adapun masalah yang paling kompleks yaitu, masyarakat yang tinggal di kota besar seperti DKI Jakarta sekalipun masih banyak yang belum begitu terbiasa menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku. Terlebih lagi bagi masyarakat yang tinggal di kota kecil ataupun yang bertempat tinggal daerah pedesaan, yang dimana akses internetnya masih sangat terbatas dan penerimaan informasinya juga tidak seluas di wilayah

perkotaan. Dengan permasalahan tersebut perlu adanya pembaharuan dan penyederhanaan tanpa mengurangi kualitas fitur yang sudah ada dan membuat terobosan inovasi lain sebagai pelengkap informasi pertanahan untuk memaksimalkan Aplikasi Sentuh Tanahku. Karena meskipun memiliki potensi yang besar, keberhasilan implementasi Sentuh Tanahku sangat bergantung pada kepuasan dan pengalaman pengguna. (Amdar, 2023).

Secara keseluruhan Aplikasi Sentuh Tanahku adalah aplikasi layanan pertanahan yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai informasi dan pelayanan pertanahan secara cepat, transparan, praktis, serta menghadirkan data yang terintegrasi, sehingga masyarakat tidak harus selalu datang ke kantor pertanahan hanya untuk mengecek status berkas atau mencari informasi dasar. Namun, di balik fitur yang canggih tersebut, masih terdapat beberapa kendala yang cukup signifikan, seperti ketidaksesuaian informasi antara aplikasi dengan kantor pertanahan setempat, masyarakat belum sepenuhnya memahami manfaat dan cara menggunakan aplikasi ini, terutama di daerah dengan infrastruktur teknologi yang masih terbatas, masalah verifikasi dan kapasitas server, karenanya proses verifikasi identitas pengguna terkadang mengalami kendala, terutama ketika sistem server sedang padat, yang menyebabkan waktu tunggu pengguna bertambah sebelum dapat mengakses semua fitur aplikasi terdapat serta adanya kesenjangan dalam adopsi teknologi di berbagai wilayah di Indonesia (Noer et al., 2024).Kendala-kendala tersebut membuat pengalaman pengguna belum sepenuhnya maksimal dan perlu mendapat perhatian agar tujuan besar aplikasi ini dapat benar-benar tercapai.

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti mengangkat judul “Sistem *Barcode* sebagai Solusi Optimalisasi Informasi Pertanahan dan Sinkronisasi Data dalam Penggunaan Aplikasi Sentuh Tanahku di Desa Sindangprabu Kabupaten Garut” karena fenomena tersebut,

mengakibatkan banyaknya masyarakat yang masih kesulitan dalam mendapatkan informasi persyaratan untuk mengurus tanah. Perbedaan informasi antara aplikasi dan kantor pertanahan sering membuat masyarakat bingung, sehingga proses pengurusan jadi tidak efektif.

Sistem *barcode* dipilih bukan untuk menggantikan Aplikasi Sentuh Tanahku, melainkan sebagai pelengkap yang dapat membantu masyarakat mendapatkan informasi persyaratan pengurusan sertifikat secara cepat, akurat, dan sesuai kebijakan kantor pertanahan setempat. Dengan hanya memindai *barcode*, masyarakat bisa langsung memperoleh informasi yang jelas dan valid. (Pamungkas & Purwadi, 2023).

Pemilihan Desa Sindangprabu sebagai lokasi pengambilan sampel didasarkan pada kondisi wilayah yang relevan dengan topik penelitian, serta dinamika sosial dan karakteristik masyarakat yang mendukung proses pengumpulan data secara langsung. Desa Sindangprabu juga memiliki posisi yang cukup strategis, berada di kawasan yang dimana dekat dengan pusat kota, namun tetap mempertahankan ciri khas pedesaan yang kuat. Kondisi ini menjadikan wilayah tersebut ideal untuk melihat interaksi antara perkembangan modern dengan kehidupan masyarakat desa.

Melalui penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat menjadi acuan bahwa baik kota besar maupun kota kecil sama-sama membutuhkan peningkatan kualitas layanan publik. Di era digital saat ini, pelayanan publik harus dirancang secara inovatif, efisien, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Peneliti juga berharap sistem *barcode* dapat menjadi pendukung yang efektif bagi Aplikasi Sentuh Tanahku. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat membantu mengurangi ketidaksesuaian informasi serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai persyaratan pengurusan tanah. Hal ini menjadi semakin penting khususnya di Desa Sindangprabu sebagai lokasi observasi yang representatif, dimana

masyarakat masih membutuhkan akses informasi yang lebih sederhana, jelas, dan akuntabel. Hal tersebut dilakukan tidak hanya bagi kepentingan instansi pemerintah saja, tetapi juga sebagai tolak ukur kemajuan suatu negara.(Daraba et al., 2023).

1.2. Rumusan Masalah

1. Mengapa masyarakat masih mengalami kesulitan dalam menggunakan Aplikasi Sentuh Tanahku, terlebih masyarakat di kota kecil atau pedesaan seperti Desa Sindangprabu?
2. Mengapa terjadi Ketidakkonsistenan informasi antara Aplikasi Sentuh Tanahku dengan kantor pertanahan Kabupaten Garut?
3. Bagaimana sistem *barcode* dapat dirancang dan diterapkan sebagai solusi pelengkap untuk membantu masyarakat memperoleh informasi persyaratan pengurusan tanah secara cepat, akurat, dan sesuai ketentuan Kantor Pertanahan Kabupaten Garut di Desa Sindangprabu?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dan manfaat penelitiannya adalah :

1. Sejauh mana masyarakat dapat menggunakan Aplikasi Sentuh Tanahku
2. Mengetahui apa yang menjadi kendala ketidaksesuaian antara informasi pertanahan di Aplikasi Sentuh Tanahku dengan kebijakan yang di tetapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Garut.
3. Bagaimana sistem *barcode* dapat dirancang dan diterapkan sebagai solusi pelengkap untuk membantu masyarakat memperoleh informasi persyaratan pengurusan tanah secara cepat, akurat, dan sesuai ketentuan Kantor Pertanahan Kabupaten Garut di Desa Sindangprabu?

Adapun manfaat dari penelitian ini untuk mengetahui apa saja kendala yang dirasakan oleh masyarakat dan diharapkan menghasilkan buah pikiran dan gagasan yang dapat dimanfaatkan untuk:

1. Manfaat Akademis

- a. Menambah referensi ilmiah mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam layanan publik, khususnya pada sektor pertanahan.
- b. Memberikan kontribusi teoritis terkait penggunaan sistem pendukung (seperti *barcode*) dalam meningkatkan akurasi dan keselarasan informasi layanan berbasis aplikasi.
- c. Memperkaya kajian akademik mengenai tantangan implementasi aplikasi pemerintah di tingkat desa, termasuk perbedaan kebutuhan pengguna di wilayah kota besar dan kota kecil.
- d. Menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan sistem integrasi informasi pertanahan atau inovasi pelayanan digital lainnya.

2. Manfaat Teknis

- a. Menyediakan alternatif solusi praktis untuk mengatasi ketidaksesuaian informasi antara aplikasi Sentuh Tanahku dan kebijakan di kantor pertanahan setempat.
- b. Meningkatkan kemudahan akses informasi bagi masyarakat melalui penggunaan sistem *barcode* yang sederhana, cepat, dan mudah dipahami.
- c. Mendukung optimalisasi fungsi Aplikasi Sentuh Tanahku dengan memberikan fitur pelengkap yang dapat memperkuat akurasi data dan meminimalisir kebingungan pengguna.
- d. Mendorong peningkatan kualitas layanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsif, terutama bagi masyarakat di kota-kota kecil dan wilayah pedesaan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku sebagai media informasi pelayanan pertanahan di Desa Sindangprabu masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, tampilan aplikasi yang kurang sederhana, keterbatasan akses internet, serta ketidaksesuaian informasi antara aplikasi dengan persyaratan yang diterapkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Garut. Kondisi ini menyebabkan masyarakat sering mengalami kebingungan, kekurangan berkas, dan harus melakukan kunjungan berulang ke kantor pertanahan. Sebagai solusi, peneliti merancang sistem *barcode* yang terintegrasi dengan *Google Drive* untuk menyebarkan informasi persyaratan pelayanan pertanahan secara sederhana dan sistematis berdasarkan kategori pemohon dan jenis layanan. Melalui pemindaian *barcode*, masyarakat dapat langsung mengakses informasi persyaratan, formulir permohonan, dan data pendukung yang telah disesuaikan dengan ketentuan Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, tanpa menggantikan fungsi Aplikasi Sentuh Tanahku, melainkan sebagai media pelengkap. Sistem ini memiliki keunggulan berupa kemudahan akses, kesederhanaan penggunaan, fleksibilitas pembaruan data, efisiensi biaya, serta meminimalisir kesalahan informasi dan kekurangan berkas, sekaligus berpotensi membantu Kantor Pertanahan Kabupaten Garut mengurangi beban pelayanan loket informasi dan memperkuat citra pelayanan publik yang adaptif terhadap teknologi. Hasil evaluasi menunjukkan tanggapan yang sangat positif dari masyarakat, Kantor Desa Sindangprabu, maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, yang bahkan tertarik mengembangkan sistem ini ke desa-desa lain. Dengan demikian, sistem *barcode* yang dirancang tidak hanya menjadi solusi atas permasalahan akses informasi persyaratan pelayanan pertanahan, tetapi juga menunjukkan potensi sebagai inovasi pelayanan publik yang sederhana, ekonomis, adaptif, dan mudah direplikasi, sehingga diharapkan dapat mendukung terwujudnya pelayanan pertanahan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Garut

Sistem *barcode* yang telah dirancang dapat dijadikan sebagai media pelengkap pelayanan informasi pertanahan untuk membantu masyarakat memperoleh informasi persyaratan yang lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, diperlukan pembaruan informasi secara berkala agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap relevan dan akurat.

6.2.2 Bagi Pemerintah Desa Sindangprabu

Keberadaan sistem *barcode* dapat dimanfaatkan sebagai pusat informasi pelayanan pertanahan di tingkat desa. Perangkat desa diharapkan dapat berperan aktif dalam membantu masyarakat mengakses dan memahami informasi yang tersedia sehingga pemanfaatan sistem dapat berjalan secara optimal.

6.2.3 Bagi Masyarakat Desa Sindangprabu

Sistem *barcode* diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi awal sebelum mengajukan pelayanan pertanahan sehingga masyarakat dapat mempersiapkan dokumen secara lebih lengkap dan mengurangi risiko terjadinya kekurangan berkas administrasi.

6.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dikembangkan dengan melakukan implementasi sistem *barcode* pada cakupan wilayah yang lebih luas, mengintegrasikan sistem dengan layanan digital lainnya, atau melakukan pengukuran tingkat efektivitas sistem terhadap peningkatan kualitas pelayanan pertanahan secara kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N. Iaras. (2022). Kajian Identifikasi Korupsi Pada Layanan Pertanahan Di Kementerian ATR/BPN (Lanjutan_). In *Komisi Pemberantasan Korupsi*.
- Amdar, R. (2023). Implementasi E- Government (Aplikasi Sentuh Tanahku) dalam Meningkatkan Kualitas Informasi Pelayanan Sertifikat Tanah Pada Kantor Pertanahan Kota Kendari. *PAMARENDA : Public Administration and Government Journal*, 2(3). <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v2i3.31260>
- Daraba, D., Salam, R., Wijaya, I. D., Baharuddin, A., Sunarsi, D., & Bustamin, B. (2023). MEMBANGUN PELAYANAN PUBLIK YANG INOVATIF DAN EFISIEN DI ERA DIGITAL DI INDONESIA. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 5(1). <https://doi.org/10.61076/jpp.v5i1.3428>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3).
- Fahmi Charish Mustofa. (2020). Evaluasi Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 6(2).
- Faridhotul Hidayah, N., Paranita Kartika R., K., & Nur Budiman, S. (2022). PENERAPAN METODE NAIVE BAYES DALAM ANALISIS SENTIMEN APLIKASI SENTUH TANAHKU PADA GOOGLE PLAY. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 6(2). <https://doi.org/10.36040/jati.v6i2.5610>
- Handayani, F., Sari, D. M., & Yuniarti, A. (2022). Penyebab-Penyebab yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1). <https://doi.org/10.32639/jiak.v11i1.14>
- Hidayat, A. (2023). UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK MELALUI DIGITALISASI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG. *JURNAL SATYA INFORMATIKA*, 8(01). <https://doi.org/10.59134/jsk.v8i01.233>
- Huberman, & Miles. (1992). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 02(1998).
- Hupe, P., & Hill, M. (2007). Street-level bureaucracy and public accountability. *Public Administration*, 85(2). <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2007.00650.x>
- Kuncoro. (2022). Pengertian Data Sekunder Menurut Beberapa Ahli. In *Dqlab.id*.
- Masri, E., & Hirwansyah. (2023). Kebijakan Penerbitan Sertipikat Elektronik Pada Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum. *KRTHA BHAYANGKARA*, 17(1). <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.2109>
- Maulia Junyka Widyawati, & Ismunawan. (2022). ANALISIS PENYEBAB-PENYEBAB YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

- PEMERINTAH DAERAH SURAKARTA. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 1(6).
<https://doi.org/10.53625/juremi.v1i6.2090>
- Muhaimin, H., Ichwan, W., Basith, R. A., & Veryanto, D. R. (2023). Etika Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Layanan Publik Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Kepercayaan Masyarakat. *Journal Law and Government*, 1(2).
<https://doi.org/10.31764/jlag.v1i2.16267>
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*.
- Mustofa, F. C., Aditya, T., & Sutanta, H. (2018). Sistem Informasi Pertanahan Partisipatif untuk Pemetaan Bidang Tanah: Sebuah Tinjauan Pustaka Komprehensif. *MAJALAH ILMIAH GLOBE*, 20(1). <https://doi.org/10.24895/mig.2018.20-1.702>
- Noer, R. T., Semarang, U. N., Niravita, A., Adymas, M., Fikri, H., & Nugroho, H. (2024). TRANSFORMASI DIGITAL PENDAFTARAN TANAH: TANTANGAN DAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI APLIKASI SENTUH TANAHKU DALAM ERA SOCIETY 5.0. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(6).
- Pamungkas, E. A., & Purwadi, H. (2023). Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Pertanahan Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Unars*, 7(1).
- Pitrianti, S., Sampetoding, E. A. M., Purba, A. A., & Pongtambing, Y. S. (2023). LITERASI DIGITAL PADA MASYARAKAT DESA. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 3(1). <https://doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.655>
- Purnamasari, I., Nurfadillah, R. S., Hamidah, S., Oktavia, Y., Fajar, H. A., Muttaqin, D. A. B., Maulidiyana, M., Ulumudin, J., Nurani, P. M., Taufik, R., Akihari, B. D. E., Fazri, M. I. K., Agriyanto, A., Zulkarnaen, A. I., Latif, A., Najib, R., Fauzi, K. A., Nurhayati, M., Agistina, A., ... Alamsyah, R. (2023). Meningkatkan Strategi Pemasaran di Desa Sindangprabu. *Jurnal PkM MIFTEK*, 4(1). <https://doi.org/10.33364/miftek/v.4-1.1318>
- richard oliver (dalam Zeithml., dkk 2018). (2021). Observasi Lapangan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Siagian, H. F. A. S. (2023). Mengenal Revolusi Industri 5.0. *Direktorat Jendral Kekayaan Negara*, (2).
- Siti Romdona, Silvia Senja Junista, & Ahmad Gunawan. (2025). TEKNIK PENGUMPULAN DATA: OBSERVASI, WAWANCARA DAN KUESIONER. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, 3(1).
<https://doi.org/10.61787/taceee75>
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Syaifurrohman, S., & Nasution, F. A. (2021). Optimalisasi Pendidikan Politik melalui Literasi Digital bagi Penyandang Disabilitas dalam Industri 4.0 di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 5(1). <https://doi.org/10.32585/jkp.v5i1.800>

- Veronika, R., Ginting, B., Arindani, D., Mega, C., Lubis, W., & Shella, A. P. (2022). Literasi digital sebagai wujud pemberdayaan masyarakat di era globalisasi. *Jurnal Pasopati*, 3(2).
- Wulan, R. R., & Mustam, M. (2017). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Di Kantor Pertanahan Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review* , 6(3).
- Zulham, Lubis, Z., Zarlis, M., Reza Aulia, M., & Tanjung, Y. W. (2023). Strategi Optimalisasi Adopsi Teknologi Sistem *Barcode* di Pt. Langkat Nusantara Kepong. *Technomedia Journal*, 8(1 Juni). <https://doi.org/10.33050/tmj.v8i1.1935>
- Mariana Derlan Masia Harahap., Ferdinand., & Luluk Tri Harinie. (2023). Pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku Guna Perbaikan Kinerja Layanan di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya *Edunomics Journal*, Vol.4(2)
- Setyo Utomo.(2025). Peningkatan Literasi Hukum dan Literasi Digital Masyarakat Desa dalam Pencegahan Sengketa Melalui Pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku Vol. 5(2) Desember 2025. <http://almufi.com/index.php/AJPKM>